

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN MASYARAKAT DI DESA LENGANENG KECAMATAN
TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Chindy Sasauw¹
Ronny Gosat²
Welly Waworundeng³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana yang dilakukan pada BUMDes Desa Lenganeng sudah efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana. maka peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian Kualitatif . Penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya, focus penelitian ini adalah efektivitas Badan usaha Milik desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di desa lenganeng kecamatan tabukan Utara kabupaten kepulauan sangihe, dalam hal ini ada 3(Tiga) indikator Efektivitas Pelayanan yaitu : Optomasi Tujuan, Perspektif sistematika, Perilaku pegawai dalam organisasi, dari ketiga hal ini Optimasi tujuan adalah indikator yang paling utama dari efektifnya penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa,. Hasil penelitian ini menunjukkan Pencapaian target dari badan usaha Milik Desa “Aldus” cukup baik di lihat dari berjalannya roda organisasi BUMdesa secara teratur, dan juga neraca organisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemampuan dari masing-masing Pengurus Badan Usaha Milik Desa “aldus” dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Posisinya masing-masing berjalan dengan baik ini di buktikan dengan dampak langsung terhadap masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya Badan usaha Milik Desa, walaupun memang belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci : Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Sebagai unit terkecil dari negara, desa secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki 74.093 desa (BPS, 2013), dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal (Susetawan, 2011). Salah satu strategi untuk menanggulangi hal ini adalah mewujudkan kewirausahaan desa dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh komunitas masyarakat desa untuk merubah kondisi sosial pedesaan (Ansari, 2013). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dimana BUMDes diharapkan berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan (Prabowo, 2014). Di sisi lain, desa memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal dan tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi (Eko et al., 2014) Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pengkajian peranan BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai

organisasi ekonomi. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan, dan b) Political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rutiadi, 2001 dalam Bachrein, 2010).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes).

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78, pasal 79, pasal 80, serta pasal 81. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat,

baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif, dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. Sumber dana BUMDes Lenganeng dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari pendirian BUMDes itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Lenganeng ini adalah berupa usaha dagang perajin Pandai Besi (Kipung) yang tumbuh banyak di masyarakat, dan kredit umum. Karena BUMDes diperuntukkan bagi masyarakat yang penghasilannya tergolong sangat rendah, maka BUMDes juga menyediakan jasa simpan pinjam agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari serta memenuhi kebutuhannya. Namun dari adanya bantuan tersebut, tidak menjamin bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Setiap usaha yang dijalankan baik usaha perdagangan ataupun usaha jasa, tentunya akan

mengalami suatu masalah atau kendala dalam menjalankannya. BUMDes salah satunya, walaupun tujuan didirikannya BUMDes ini adalah untuk membantu masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDes tersebut mendapatkan masalah.

Tinjauan Pustaka

Menurut Moenir (2002:17) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik harus profesional untuk memberikan pelayanan yang efektif dan harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 adalah :

1. Transparansi.

Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas.

Yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional.

Yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif.

Berarti masyarakat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak.

Tidak diskriminatif dalam arti tidak ada pembedaan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ratminto, 2005:19-20).

Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Standar pelayanan merupakan ukuran atau parameter yang dibakukan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh kedua pihak yaitu pemberi jasa layanan dan pengguna jasa layanan. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
3. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Sarana, prasarana dan atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin, satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (social capital) yang diharapkan menjadi prime over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (demand compliance scenario) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logikpendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa

pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penentuan focus penelitian memiliki dua tujuan yaitu, penetapan focus akan membatasi jadi dalam focus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar suatu informasi yang di peroleh sehingga focus dalam penelitian ini akan melihat efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa lenganeng , adapun teori yang di gunakan adalah teori yang di kemukakan oleh priata westra dalam (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149). Indikator-indikator efektifitas pelayanan aparat adalah sebagai berikut:

1. Optomasi Tujuan
2. Perspektif sistematika
3. Perilaku pegawai dalam organisasi

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat

menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, BUMDes, Tokoh Masyarakat, Masyarakat umum.

Hasil Penelitian

1. Optimasi Tujuan

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (kepala Desa, ketua Majelis Tua-tua kampung, Ketua Badan usaha Milik Desa, kepala

unit Usaha pandai Besi dan Masyarakat sebanyak tiga orang) tentang efektifitas badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lenganeng peneliti menemukan bahwa Oprimasi Tujuan atau usaha untuk mencapai target kerja dari Perangkat Badan usaha sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan di targetkan, hal ini di buktikan dengan beroprasinya semua unit usaha yang telah tertata dalam struktur badan usah Milik desa serta berdampak terhadap kesejahteraan dari Masyarakat di desa lenganeng.

2. Perspektif Sistematika

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (kepala Desa, ketua Majelis Tua-tua kampung, Ketua Badan usaha Milik Desa, kepala unit Usaha pandai Besi dan Masyarakat sebanyak tiga orang) tentang efektifitas badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lenganeng peneliti menemukan bahwa perspektif sistematika atau kemampuan dari masing-masing personil badan usaha Milik desa sudah mampu mengerjakan dengan cukup baik apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab yang melekat pada setiap personil pengurus Badan usaha Milik Desa, dengan berbagai macam pelatihan dan juga pendampingan maka sudah ada beberapa Personil yang memiliki skil yang cukup baik dalam bidang masing masing yang berdampak pada Berhasilnya program yang di rencanakan dan juga berdampak pada adanya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan dari masyarakat desa lenganeng.

3. Perilaku Pegawai dalam Organisasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan melalui

wawancara dengan berbagai Satake holder yang ada di lapangan (kepala Desa, ketua Majelis Tua-tua kampong, Ketua Badan usaha Milik Desa, kepala unit Usaha pandai Besi dan Masyarakat sebanyak tiga orang) tentang efektifitas badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lenganeng peneliti menemukan bahwa perilaku dari personalia yang ada di Badan usaha Milik Desa dalam hal melakukan inovasi Masih kurang namun demikian keuletan dan ketelitian cukup baik berdampak pada maksimalnya kinerja yang bertujuan pada tercapainya target dari Badan Usaha Milik desa yaitu meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Kesimpulan

1. Pencapaian target dari badan usaha Milik Desa "Aldus" cukup baik di lihat dari berjalannya roda organisasi BUMdesa secara teratur, dan juga neraca organisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kemampuan dari masing-masing Pengurus Badan Usaha Milik Desa "aldus" dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Posisinya masing-masing berjalan dengan baik ini di buktikan dengan dampak langsung terhadap masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya Badan usaha Milik Desa, walaupun memang belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.
3. Keuletan dn ketelitian dari para pengurus Badan usaha Milik desa dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawab adalah cukup baik walaupun Masih kurang berinovasi.
4. Jika di lihat secara keseluruhan kehadiran Badan usaha Milik Desa di desa lenganeng Telah Cukup

Berhasil dan Cukup Efektiv dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Saran

1. Dengan capaian target yang bias di katakana lumayan baik maka perlu adanya peningkatan target program secara keseluruhan.
2. Sumber daya atau kemampuan dari Pengurus Badan Usaha Milik Desa Perlu di Tingkatkan lagi, agar kelak mampu mengakomodir dan menjangkau Masyarakat secara Keseluruhan.
3. Perlu adanya penambahan skil dari pengurus dan di lakukan studi-studi banding ke Badan-badan Usaha Milik desa di desa lain yang lebih Berhasil agar kelak mampu lebih berinovasi lagi.
4. Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat desa Lenganeng Perlu Dijaga Bahkan di tingkatkan agar Target Menciptakan Desa Lenganeng sebagai Desa Yang Maju, mampu dan Mandiri boleh dengan Segera tercapai.
5. Segala bentuk berhasil yang di miliki BUMDes "Aldus" Perlu di publikasikan secara Luas agar boleh Menjadi percontohan dari Badan-Badan usaha yang adfa di desa-Desa lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani. Ni Putu Meilia Utari. 2016. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dana Pinjaman Bergulir Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Pendapatan Gabungan Kelompok Tani Ayodya Pura. Skripsi. Fakultas

- Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Anonim. 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Ansari, B., et al. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science* Vol. 5 No. 1: 26-31.
- Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2 No. 1: 47-56.
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management* Vol. 17 No. 1: 99-120.
- Bhawa. Gede Andreyan Semara. 2014. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sukasada Tahun 2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Chairunnisa. 2016. Efektivitas Program Dana Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Kampung Kajian Buleleng Tahun 2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
- Creswell, Jj.W. (2010). *Qualitative Inquiry and Research Design: Chosing Among Five Approach*. University of Nebraska, Lincoln: SAGE Publication Ltd.
- De Massis, A., et al. (2015). Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis. *Journal of Small Bussiness Management* Vol. 53 No. 1: 1-36.
- Eko, S., et al. (2014). Desa Membangun Indonesia. *Sangihe: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Ensiklopedi Administrasi, 2004
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development The Addison-Wesley series in economics*. Pearson Addison Wesley.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moenir. (2000). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Lenganeng- Indonesia. *World Applied Sciences Journal*

30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice): 19-26.

Ratminto. (2006). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sedarmayanti, 2004, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Bandung, Mandar Maju.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, Metode Penelitian Survey, Suntingan LP3ES, JakaLingkungana.

Soekanto, Soejono, 1995. Penilaian Organisasi Pelayanan Publik. Puskata Pelajar Yogyakarta.

Soeryadi, 2000, Kinerja Birokrasi, Penerbit PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta

Sugiyono, 2001, Metode penelitian Administrasi, Cetakan VIII, Bandung, Alfabeta

Suiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, 2007

Sukirno. 2001. Pengantar Makro Ekonomi : Edisi II. Jakarta: Grafindo Persada

Wahyuni, S. (2012). Qualitative Research Method: Theory and Practice (Vol. 1). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wirawan. I Made Oka. 2015. Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Kerambitan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Yin, R. K. (2009). Case Study Research. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.